

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda, sudah pasti, tidak lepas dari kepentingan kolonial Belanda. Politik Etis menuntun masyarakat pribumi kearah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajah Belanda. Politik Etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901, ketika Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Awal mula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu pribumi saat mengalami kesulitan. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak ada tekad baik dan keikhlasan hati yang tulus untuk melaksanakannya. Mereka berbuat demikian karena takut kritik dan takut kalau tetap membiarkan penderitaan penduduk pribumi terus menerus akan memicu timbulnya perlawanan rakyat secara meluas atau terus menerus yang kolonialistik-eksploitatif.¹

Pada abad ke-19 sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin terhadap kesejahteraan dan status masyarakat pribumi. Mereka kemudian

¹ Agus Susilo, "Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Indonesia," *Jurnal HISTORIA* Volume 6 No 2 Tahun 2018, (diakses pada tanggal 01 Januari 2023). p. 404.

melakukan usaha-usaha secara pribadi untuk perbaikan keadaan. Orang-orang yang berusaha membantu dalam meningkatkan kemakmuran Hindia Belanda yaitu pertama K. E. Holle merupakan seorang yang membantu langsung dalam bidang pertanian kepada orang Sunda dan berusaha untuk memperbaiki keadaan negeri dan penduduk Hindia-Belanda. Kedua, C. Snouck Hurgronje merupakan penasihat yang berhubungan dengan soal-soal pribumi. Ia merupakan orang yang telah menguasai pengetahuan mengenai kehidupan dan adat kebiasaan penduduk Jawa pada tahun 1890. Ia juga memberikan konsep tentang memberikan pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk. Untuk pendidikan yang pada awalnya hanya untuk kaum priyayi, namun karena adanya kebutuhan birokrasi yang semakin meningkat, maka banyak anak priyayi rendah dan bahkan orang biasa dapat masuk pendidikan Barat di Hindia-Belanda. Ketiga, W.P.D. de Wolff van Westerrode yang meletakkan dasar-dasar pengorganisaian Bank Kredit untuk Simpan Pinjam dan Pertanian yang mengadakan perlindungan terhadap hutang-hutang.²

Pemerintah Belanda memegang peranan penting dalam pendidikan. Perubahan pendidikan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan Gubernur Jenderal atau dewan pendidikan yang bertindak atas nama pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan pada masa kolonial Belanda tidak didasari oleh

² Susilo, "Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Indonesia", p. 405.

adanya struktur organisasi yang teratur, sebab pendirian lembaga pendidikan hanya sebagai wujud usaha pemerintah Belanda untuk mempermudah dalam pelaksanaan politiknya. Adanya lembaga pendidikan, menjadikan masyarakat berpacu untuk meningkatkan intelektual bangsa, walaupun kebijakan pendidikan masih terbatas.³

Pada tahun 1909 pendidikan mendapatkan perhatian dengan berkembangnya produk industri. Berkaitan dengan arah etis yang menjadi landasan politik kolonial, maka pemerintah kolonial membuat strategi dengan sistem pendidikan dan pengetahuan Barat yang dilaksanakan sebanyak mungkin. Dengan demikian, bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar di berbagai sekolah Bumiputera, pemberian pendidikan rendah untuk golongan Bumiputera disesuaikan dengan keperluan mereka. Atas dasar itu corak dan sistem pendidikan di Hindia Belanda pada waktu ini dilaksanakan melalui dua aliran. *Pertama*, untuk memenuhi keperluan golongan atas serta tenaga terdidik yang bermutu tinggi untuk keperluan industri dan ekonomi. *Kedua*, untuk memenuhi keperluan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.

Pemerintah Hindia Belanda juga merasakan akan kebutuhan tenaga kerja yang terdidik, sehingga timbul pikiran untuk mengadakan pengajaran bagi rakyat umum di Indonesia. Timbulnya gagasan tersebut disebabkan pula

³ Susilo, "Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Indonesia", p. 405.

oleh dorongan paham *Aufklarung*⁴. Pendidikan dan pengajaran yang dalam pemerintahan lama dapat dikatakan hanya terdapat di kalangan atas oleh Napoleon Bonaparte diubah dan pendidikan dijadikan tanggungan pemerintah. Pendidikan dan pengajaran rendah, menengah dan tinggi disusun dan dinetralisasi. Dengan demikian, pendidikan dan pengajaran tidak lagi merupakan monopoli golongan atas saja.

Mulai saat itu pendidikan yang diterapkan di Nusantara mengalami perluasan. Bukan hanya terbatas pada bangsa Belanda saja, tetapi juga untuk orang-orang bumiputra. Tidak hanya terbatas pada usaha mempersiapkan calon-calon pegawai pemerintah saja, tetapi seperti halnya di Nederland, sekolah-sekolah juga ditujukan untuk memajukan penduduk.

Sesungguhnya tujuan utama Pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan kepada golongan bumiputera adalah untuk mendapatkan tenaga terdidik dengan biaya murah. Sebab bila pegawai untuk administrasi pemerintah ataupun pekerja bawahan harus didatangkan dari Negeri Belanda, sudah tentu memerlukan biaya yang cukup besar.⁵

⁴ *Aufklarung* yang berarti fajar atau terang atau yang telah menjadi terang. Ciri-cirinya antara lain ialah percaya pada nalar, pada sifat-sifat baik dari manusia dan kesempumaannya, menuju ke arah perikemanusiaan dan menjunjung akal sehat. (Mufti Ali, *Banten dan Pembaratan*, Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2015).

⁵ Djohan Makmur, Haryono, dan Pius Suryo, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajah* (Jakarta: CV Mandala Bhakti, 1993). p. 63.

Memasuki awal abad ke-20 berbagai sekolah semakin berkembang di Pulau Jawa sehingga masyarakat, meskipun masih sangat terbatas mulai menikmati pendidikan. Berbagai macam sekolah yang ada merupakan kelanjutan dari abad ke-19 atau di dirikan pada abad ke-20, pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang umum bagi sekian banyak golongan penduduk yang beranekaragam, dimana persekolahan di dasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Pada akhir abad ke-19 Kabupaten Lebak merupakan salah satu yang terbelakang dalam masalah pendidikan. Sekolah yang dibuka untuk kalangan pribumi hanya terdapat di Rangkasbitung.⁶

Sekolah Rakyat atau *Volkschool* (Ada juga yang menyebutnya sekolah Desa) ini pertama kali di dirikan pada tahun 1907 dan disediakan untuk anak-anak rakyat biasa yang tinggal di desa-desa.⁷

Pada masa kependudukan Belanda di wilayah Lebak tetap terkena imbasnya yang saat itu masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Penerapan politik etis membuat lahirnya sebuah sekolah salah satunya yang berada di daerah pedesaan yang menjadi salah satu tujuan dari politik etis

⁶ Nina H. Lubis, dkk., *Sejarah Kabupaten Lebak*, (Lebak: Pemerintah Kabupaten Lebak, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.), p. 215.

⁷ Nina H. Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), p.131.

dari bidang pendidikan, dan sekolah tersebut disebut sebagai sekolah desa, atas dasar perintah. Perkembangan pendidikan pada wilayah Rangkasbitung sangat terpengaruh akibat faktor sosial dan ekonomi, keberadaan jarak sekolah yang jauh serta berbagai pendukung lainnya yang belum memadai yang pada akhirnya sangat sedikit dari mereka dapat lulus dari sekolah tersebut yang berasal dari wilayah jauh. Sekolah Rakyat Rangkasbitung hadir dari latar belakang politik etis yang diberlakukan oleh Belanda terhadap tanah jajahannya yang salah satunya dalam bidang pendidikan namun tidak semua masyarakat khususnya wilayah daerah Rangkasbitung dapat merasakan bangku pendidikan pada masa kependudukan Belanda.⁸

Rangkasbitung merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Lebak sejak masa Pemerintahan Belanda, daerah tersebut dianggap memiliki kelebihan pada kondisi geografisnya yang berada di dekat tiga aliran sungai: yaitu sungai Ciujung, sungai Ciberang, sungai Cisimeut. Dijadikan sebagai ibukota pemerintah Belanda bertujuan untuk meminimalisir pergerakan perlawanan rakyat serta agar lebih ketat dalam mengawasi Bupati dan pejabat pribumi lainnya.⁹

⁸ Suradi, dkk, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1986), p. 28.

⁹ Ginandar, *Toponimi Nama-Nama Kecamatan di Kabupaten Lebak*, (Rangkasbitung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, 2022), p. 33.

Melihat kondisi ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Sejarah Perkembangan Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Pada Tahun 1907-1960 Penulis merasa perlu untuk mengeksplorasi lebih jauh kaitan antara politik etis serta perkembangan Sekolah Rakyat di Rangkasbitung pada masa Kolonial Belanda dan Jepang.

B. Rumusan Masalah

Sejauh ini, masyarakat umum belum banyak yang mengetahui bahwa di Lebak terutama di daerah Rangkasbitung terdapat sekolah rakyat atau *Volkschool* pada zaman kolonial Belanda.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan bahwa masalah pokok yang akan diteliti dalam studi penelitian ini adalah Sejarah Perkembangan Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Pada Tahun 1907-1960 Masalah pokok tersebut di identifikasikan kepada masalah lain yang terperinci yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda?
2. Bagaimana sejarah Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di Indonesia?
3. Bagaimana sejarah dan perkembangan Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di Rangkasbitung?

C. Tujuan

Dengan bertitik tolak pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda.
2. Untuk mengetahui sejarah Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di Rangkasbitung.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan tinjauan kepustakaan terhadap beberapa karya tulis, baik berupa buku-buku dan jurnal. Dalam penelusuran ini peneliti menemukan beberapa hasil yang cukup penting menjadi perhatian, diantaranya sebagai berikut:

Buku yang berjudul *Banten dan Pembaratan* ditulis oleh Mufti Ali. Dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Diterbitkan oleh LP2M IAIN SMH Banten pada tahun 2015. Buku ini sekilas menjelaskan tentang bagaimana sejarah dan perkembangan Pendidikan di Banten yang di usung oleh Kolonial Belanda di berbagai daerah yang ada di provinsi Banten, termasuk salah satunya yaitu Sejarah Sekolah di Rangkasbitung yang menjadi salah satu topik dari pembahasan buku ini, tidak hanya itu di dalam

pembahasan buku ini pun menjelaskan terkait kurikulum dan pembelajaran di Rangkasbitung dan berbagai daerah kabupaten atau kota di Banten.

Kedua yaitu buku yang berjudul *Sejarah Kabupaten Lebak Karya Nina Lubis, dkk.* Buku ini merupakan hasil penelitian yang sudah diterbitkan menjadi buku. Yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran pada tahun 2006. Dalam buku ini pembahasan terkait bagaimana sejarah kabupaten lebak yang di dalamnya terdapat beragam pembahasan mengenai asal-usul kabupaten lebak, dalam bidang sosial, ekonomi dan juga terdapat pembahasan terkait bagaimana pendidikan pada masa Kolonial Belanda dan masa Kependudukan Jepang di Lebak, hal ini juga berkaitan dengan pembahasan apa yang akan peneliti tuliskan dalam penyelesaian tugas akhir. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana kondisi guru dan juga murid nya pada masa Hindia Belanda dan masa Kependudukan Jepang. Disisi lain tidak ada pemaparan terkait sistem pembelajaran pada masa Kolonial Belanda maupun masa Kependudukan Jepang.

Ketiga yaitu jurnal yang berjudul *Perkembangan Sekolah Rakyat (Volkschool) di Gunung Kencana Kabupaten Lebak Tahun 1940-1960*, karya Andi Suherman dan Weny Wdyawati Bastaman. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah Vol.2 No.2. Tahun 2019.* Dalam jurnal ini

membahas terkait bagaimana sejarah dan perkembangan sekolah rakyat (*Volkschool*) di Gunung Kencana, menjelaskan bagaimana pengaruh politik etis dalam bidang edukasi melahirkan suatu gagasan dengan dibangunnya sekolah ke pelosok desa, jurnal ini banyak memberikan informasi terkait bagaimana kondisi pribumi saat itu berjuang untuk mengenyam bangku pendidikan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, dan juga dalam pembahasan jurnal ini menjelaskan terkait kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk masyarakat pribumi dalam bidang pendidikan. Tentunya jurnal ini sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang akan peneliti bahas, dikarenakan pembahasannya tidak jauh berbeda hanya saja yang membedakan yaitu tempat penelitiannya, karena fokus peneliti itu berada di Kecamatan Rangkabitung, Kabupaten Lebak Banten,

Dari ketiga penelitian diatas menjelaskan pembahasan mengenai Sekolah Rakyat, akan tetapi yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada bagian inti dari isi pembahasan, serta fokus penelitian penulis yang memfokuskan penelitian di daerah Rangkasbitung dimana penulis lebih menjelaskan secara detail terkait bagaimana Sekolah Rakyat berkembang dan bagaimana kondisi Sekolah Rakyat di Rangkasbitung ini setelah kemerdekaan. maka dari itu peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap *Sejarah dan Perkembangan Sekolah Rakyat (Volkschool)* Khususnya di daerah Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menelusuri beberapa fakta lapangan yang valid terkait kondisi, latar belakang, peran, objek, dan pelaku serta peristiwa yang terjadi sebenarnya, maka penulis mengambil langkah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis (Sejarah) ini merupakan suatu usaha untuk menyelidiki fakta data lapangan dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran dan melalui pemikiran yang kritis sesuai prosedur penelitian, melalui pendekatan historis ini seseorang akan diajak memasuki kedalam kejadian yang sebenarnya terjadi pada suatu peristiwa.¹⁰

Dalam membahas suatu keadaan dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu melalui pendekatan sosial yang mana akan berkesinambungan terhadap masyarakat, gejala sosial, faktor yang mendorong terjadinya suatu hubungan serta kepercayaan dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam sebuah proses terjadinya sebuah peristiwa. Untuk memperdalam kajian teoritis dalam penelitian tentang dinamika suatu perubahan, maka penulis menggunakan pendekatan historis- sosial yang memberikan sebuah hubungan pemahaman tentang sebuah hubungan terhadap peristiwa yang telah terjadi.

¹⁰ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), p. 27.

Dari pembahasan diatas, penulis kemudian lebih lanjut lagi menguraikan pengertian judul penelitian secara mendalam, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Kata sejarah menurut pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut: J. Bank berpendapat bahwa Sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Sejarah untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Robin Winks berpendapat bahwa Sejarah adalah studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Leopold von Ranke berpendapat bahwa Sejarah adalah peristiwa yang terjadi.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran, menurut tingkatannya, ada tiga yaitu dasar, lanjutan, tinggi.¹²

Volkschool merupakan istilah yang digunakan oleh orang Belanda terkait sekolah rakyat. Dalam hal ini sekolah bagi masyarakat pribumi merupakan suatu Lembaga di bidang Pendidikan untuk mencari ilmu. Dan *Volkschool* dibentuk pada saat zaman Kolonial Belanda untuk masyarakat pribumi agar terdidik. Dimana pada zaman Kolonial Belanda menerapkan

¹¹ Abdullah, T. dan A. Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*, (Jakarta: Gramedia, 1985), p.25.

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

sebuah politik yang disebut politik Etis yang digunakan oleh Belanda sebagai politik balas budi untuk membalas kebaikan yang dilakukan masyarakat kepada pihak Belanda saat tanam paksa sekaligus memperkuat kedudukan Belanda di wilayahnya, dan politik etis sendiri memiliki tiga sektor tujuan yaitu emigrasi, pendidikan dan irigasi. Dalam bidang pendidikan memberikan sedikit pemahaman mengenai bahasa Belanda, pengetahuan tentang berladang dan pengetahuan lainnya. Semangat bersekolah ditunjukkan oleh para siswa yang berdatangan dari berbagai pelosok.¹³

Dalam buku *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajah* karya Djohan Makmur dkk, menurutnya Politik pendidikan yang dijalankan Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu tidak lain adalah hanya untuk mempersiapkan anak didik menjadi pegawai administrasi di kantor pemerintah atau di perusahaan-perusahaan Belanda. Karena itu hanya sampai pada Sekolah Dasar Eropa yaitu *Eueopeesche Legere School* (ELS). Tingkat kepandaiannya belum dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dari lulusan atau tamatan ELS (*Eueopeesche Legere School*) masih diduduki oleh tenaga dari Negeri Belanda yang pendidikannya lebih tinggi. Selain pertimbangan itu pemerintah memperhatikan tindak lanjut dari pendidikan yang telah ada agar modernisasi di bidang pendidikan segera dapat tercapai.

¹³ Nina H. Lubis, dkk, *Sejarah Kabupaten Lebak. Lebak: Pemerintah Kabupaten Lebak*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), p. 289.

Perhatian pemerintah itu didasarkan adanya beberapa usul dan desakan dari orang-orang Belanda sendiri untuk mendirikan sekolah lanjutan. Akan tetapi pelaksanaannya masih selalu mengalami kegagalan. Beberapa tempat memiliki bangunan sekolah, yang mirip sekali kepada sebuah gubug dan kulit kayu. Isi rencana pelajarannya terutama sekali disesuaikan dengan keharusan sekolah untuk mendidik calon-calon pegawai, karena praktek menuntut dari pegawai bumiputra penguasaan bahasa Melayu, yang ketika itu dipakai sebagai bahasa resmi, maka di sekolah di samping bahasa daerah diberikan juga bahasa Melayu. Yang jelas menunjukkan sifatnya mendidik calon-calon pegawai ialah diberikannya mata pelajaran mengukur tanah, hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan Tanam Paksa.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam rangka menguji dan mengkaji kebenaran rekonstruksi sejarah yang sudah ada dan peninggalannya, maka penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan metode penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto yang meliputi empat tahapan, yaitu Pengumpulan Sumber (Heuristik), Verifikasi (Kritik Sejarah), Interpretasi (Analisis Sumber) dan Historiografi.¹⁵

1. Heuristik

¹⁴ Makmur, Haryono, dkk, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajah*, (1993), p. 70.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 2006), p. 91.

Heuristik merupakan suatu langkah dalam penelitian sejarah, seorang peneliti sejarah harus mengumpulkan sumber-sumber, bahan-bahan, dan arsip-arsip sejarah yang berhubungan dengan peristiwa sejarah yang akan diteliti. Ada dua macam sumber dalam heuristik yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder.

Sumber Primer yaitu sumber yang disampaikan oleh saksi mata dalam bentuk dokumen maupun sumber lisan. Dalam hal ini penulis mendapatkan sumber primer berupa sumber-sumber arsip yang berupa dokumen dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini, Sumber arsip dan dokumen tersebut penulis dapatkan di:

- a. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip :
 - 1) No. 361/36. KIT Jawa Barat. Arsip Gambar Guru dan Murid Sekolah Rakyat (Volkschool). Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - 2) No. 4804. Secretarie Serie Grode. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- b. Perpustakaan Daerah Serang, berupa arsip :
 - 1) Arsip Ijazah Sekolah Rakyat di Pagelaran atas nama Oden pada tahun 1940.
- c. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berupa buku mata pelajaran Sekolah Rakyat :

- 1) Buku Mata Pelajaran Sedjarah Tanah Air untuk kelas V-VI Sekolah Rakjat.
 - 2) Buku Mata Pelajaran Kerdjakan 10! Buku Hitung untuk Sekolah Rakjat di Indonesia.
 - 3) Buku Pintu Bahasa.
 - 4) Buku Mega Tjerah.
 - 5) Buku Hitung Jang Kedelapan.
- d. Selain itu juga penulis melakukan wawancara yang pernah merasakan Sekolah Rakyat di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten, diantaranya:
- 1) Wawancara dengan Ibu Imas, Hari Rabu, 17 Mei, Tahun 2023.
 - 2) Wawancara dengan Ibu Hartini, Hari Kamis, 18 Mei, Tahun 2023.
 - 3) Wawancara dengan Ibu Nadjimah, Hari Jum'at, 19 Mei, Tahun 2023.

Sumber Sekunder. Dalam hal ini penulis mendapatkan sumber sekunder berupa sumber-sumber buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.. Adapun sumber informasi terkait buku yang penulis temukan, diantaranya sebagai berikut: Karya Muhammad Rifa'I. *Sejarah Pendidikan Nasional "Dari Masa Klasik hingga Modern"*. Jogjakarta: Ar-

ruzz Media, 2011, karya Djohan Makmur, Pius Suryo Haryono, dkk. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajah*. Jakarta: CV Mandala Bhakti, 1993. Karya Nina H Lubis. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003. Karya Nina H Lubis, dkk. *Sejarah Kabupaten Lebak*. Lebak: Pemerintah Kabupaten Lebak, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006. Karya Nasution. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 1983. Karya Mufti Ali, dkk. *Banten dan Pembaratan*, Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2015. Karya Ginandar. *Toponomi Nama-Nama Kecamatan di kabupaten Lebak*. Rangkasbitung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, 2020. Karya Sugiyono, dkk. *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Tim UNY. Suradi, dkk. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Karya Abdullah, T. Surjomihardjo A. *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.1985. Karya Heri Susanto dan Syahrudin. *Sejarah Pendidikan Indonesia “Era Pra Kolonialisme Nusantara Sampai Reformasi”*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. 2019.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan mengkritik isi sumber sejarah. Verifikasi ini dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Dalam

melakukan kritik sumber penulis berusaha mencari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, serta melakukan berbagai macam kritik sumber dengan membandingkan antara buku satu dengan jurnal lainnya.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Penafsiran ini sendiri dilakukan terhadap sumber-sumber yang ditemukan. Dalam melakukan penafsiran, penulis melakukan analisis sesuai dengan fokus penelitiannya diperlukan suatu kehati-hatian. Dalam hal ini penulis juga menghubungkan fakta-fakta terkait Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di Rangkasbitung.

4. Historiografi

Tahapan penulisan kembali suatu peristiwa sebagai sebuah bentuk catatan sejarah. Historiografi merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam suatu penelitian sejarah. Historiografi itu sendiri dimaksudkan sebagai langkah penulisan hasil yang didapat seorang peneliti sejarah dalam atau selama melakukan penelitian sejarah. Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang memadai yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, dilakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber yang diperoleh yang bertujuan sebagai tes uji kebenaran terhadap sumber-sumber itu sendiri. Setelah melakukan kritik sumber, selanjutnya

dilakukan interpretasi sejarah. Hal ini bertujuan agar penulis lebih objektif dalam menuliskan karya-karyanya. Setelah semuanya dilakukan, satu hal vital yang harus dilakukan seorang sejarawan adalah menulis hasil penelitiannya dalam bentuk karya sejarah dengan menerapkan metodologi yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membahas suatu penelitian diperlukan adanya sistematika pembahasan untuk memudahkan penelitian. Kerangka pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, yang meliputi Lahirnya Politik Etis di Hindia Belanda, Tingkat Pendidikan Pada Masa Kolonial Tahun 1900-1930; a. Sekolah Dasar Untuk Bumiputera, b. Sekolah Lanjutan, c. Sekolah Tinggi.

BAB III Sejarah Sekolah Rakyat (Volkschool) di Indonesia, yang meliputi Sejarah Sekolah Rakyat (*Volkschool*) Pada Masa Kolonial Belanda, Perkembangan Sekolah Rakyat (*Volkschool*) Pada Masa Jepang.

BAB IV Sejarah dan Perkembangan Sekolah Rakyat (Volkschool) di Rangkasbitung, yang meliputi Berdirinya Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di

Rangkasbitung., Pembelajaran Sekolah Rakyat (*Volkschool*) di Rangkasbitung, dan Kondisi Sekolah Rakyat Pasca Kemerdekaan di Rangkasbitung.

BAB V Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.